

**KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
DI KELURAHAN BURU KECAMATAN BURUKABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018**

Raja Vera Dwi Yani¹, Handrisal², Novi Winarti³
rajaveradwiyani@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja
Ali Haji

Abstract

The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program is Community Empowerment program that focus on increasing community self-reliance in meeting housing needs independently. The phenomenon that occurs in this study is that there are still many people who get assistance that does not match the criteria this study aims to determine how the performance of the Implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in Buru Sub – district, Buru District, Karimun Regency in 2018. The research method used is descriptive research method. With a qualitative approach. Data collection techniques by means of observation, interviews and documentation related to implementation performance actors in the Buru Village the data obtained was then analyzed qualitatively by examining all the data collected and supported by the results with interviews with a theoretical approach according to Ripley in (Purwanto and Sulstyani 2016 106), from the results of the study it can be seen that based on the results of the study, it can be concluded that the performance of the Implementation of the Self-Help housing Stimulant Assistance Program in Buru Subdistrict, Karimun Regency in 2018 using 7 indicators there are 3 indicators that are still not optimal, namely the Coverage, Frequency and biased.

Keywords: Performance, Implementation, BSPS

Pendahuluan

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk ditangani, salah satu ciri umum dikondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, serta mata pencarian yang tidak menentu. Berdasarkan UU Dasar 1945, BAB X Warga Negara dan penduduk pasal 27 Ayat 2 tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi manusia. Oleh sebab itu pemerintah terus berupaya untuk membuat program-program pemberdayaan untuk setiap warga negaranya, termasuklah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) karena Perumahan dan Pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang juga mempunyai peran sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga.

Hal terus terjadi karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi karena ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi rumah layak huni karena kondisi ekonomi kurang baik, adapun pengetahuan mereka tentang mewujudkan tentang rumah layak huni masih terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk membangun model rumah yang dianggap layak huni.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program Pemberdayaan Masyarakat yang berfokus pada peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah secara mandiri. Program ini telah ada sejak tahun 2006 dengan nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSP2S) yang ketika itu terbatas lokasinya. Sejak tahun 2012 program ini masih dilaksanakan di seluruh provinsi dalam upaya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kekurangan rumah (backlog) yang cukup tinggi. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berbeda dengan Program bedah rumah yang dikenal masyarakat awam, karena masyarakat penerima manfaat program harus terlibat aktif dalam seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Peran aktif ini diharapkan dapat menggugah rasa komitmen masyarakat terhadap program dan rasa memiliki rumahnya karena rumah tersebut menjadi aset pemilik atau penerima manfaat program.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Masyarakat Yang Mendftar dan Menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Buru Tahun 2018

No	RT/R W	Jumlah Yang Mendaftar	Jumlah Yang Menerima
1	01/03	16 orang	12 orang
2	01/04	8 orang	4 orang
3	01/05	6 orang	5 orang
4	01/06	6 orang	3 orang
5	01/07	8 orang	5 orang
6	01/08	6 orang	2 orang

7	01/09	12 orang	7 orang
8	01/10	7 orang	7 orang
9	02/01	1 orang	4 orang
10	02/02	3 orang	2 orang
11	02/03	2 orang	2 orang
12	02/04	11 orang	6 orang
13	02/05	6 orang	2 orang
14	02/06	4 orang	2 orang
15	02/07	9 orang	6 orang
16	02/08	9 orang	5 orang
17	02/09	7 orang	5 orang
18	02/10	17 orang	12 orang
19	03/01	1 orang	1 orang
20	03/03	6 orang	5 orang
Jumlah		145 orang	94 orang

Sumber: Olahan Data Peneliti 2021

Kelurahan Buru adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun dengan jumlah penduduk sebanyak 33.263 jiwa dengan luas daratan 22,00². Agama yang di anut di Kelurahan Buru Agama Islam, Agama Budha, Agama Protestan dan Agama Khatolik. Mayoritas agama yang dianut di Kelurahan Buru ialah Agama Islam. Di Kelurahan Buru sebagian besar masyarakatnya bermata pencahariannya sebagai Nelayan. Masalah rumah tidak layak huni di Kelurahan Buru perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera karena pada dasarnya tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup. Seseorang sehat jasmani dan rohaninya apabila mendapatkan kenyamanan dalam hidupnya sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan penyediaan rumah layak huni maka perlu dibangun suatu system penyediaan rumah layak huni yang memenuhi syarat secara kualitas maupun kuantitas serta terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dari data diatas terdapat beberapa orang yang menerima bantuan berdasarkan yang mendaftar dilingkungan Kelurahan Buru Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. Angka yang terlampir di data, di peroleh berdasarkan keterangan dari fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Hermansyah menjelaskan, bahwasanya dari 145 orang yang mendaftar kami telah saring sesuai kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan ini. Karenanya dari 145 masyarakat, hanya 94 orang yang berhak dalam penerimaan bantuan, karena sesuai dengan syarat maupun kriteria yang telah di tentukan. Selain itu yang tidak dapat bantuan sebaliknya tidak lolos dalam persyaratan maupun kriteria, seperti tidak memiliki Surat tanah, padahal seperti yang telah kita ketahui Surat Tanah merupakan prioritas untuk calon penerima bantuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 tentang perumahan , Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga cerminan harkat dan martabat peneghuninya, serta aset bagi pemilknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencangkup asset fisik, tetapi mental dan social

untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik, yaitu aman sebagai tempat berlindung hal penting dalam pelaksanaan program ini karena dapat mempengaruhi tercapainya output kegiatan berupa rumah layak huni Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari data diatas dapat dibandingkan bahwa jumlah yang mendaftar dan menerima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Buru tahun 2018 lebih banyak yang mendaftar daripada yang menerima tetapi realita yang terjadi di Kelurahan Buru tidak berjalan semestinya bantuan tersebut tidak tepat sasaran, sehingga masih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak mempunyai Ruma layak huni, yang mendapatkan bantuan tersebut sebenarnya lebih banyak rumah yang layak huni dibandingkan rumah yang tidak layak huni. Maka diperlukan keadilan dari pemerintah Kelurahan Buru untuk dapat meratakan pemberian bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada penduduk yang benar-benar layak mendapatkannya, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa Program belum berjalan sesuai sehingga tujuan dari Program Bantuan Stimulan Swadaya ini belum sesuai dengan tujuan program Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Kinerja Implementasi Dari program Bantuan Stimulan Perumahan Kelurahan Buru Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2018.

I. Metode Penelitian

Penelitian Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian dengan mencari makna pemahaman dan pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang diteliti kontekstual dan menyeluruh. Menurut (Sugiono, 2016) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik suatu variable maupun lebih yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambaran tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variable satu dengan variable lainnya.

Dalam penelitian menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif bertujuan untuk mengetahui tentang Kinerja Implementasi Program BPS di Kelurahan Buru. Kemudian hasilnya dideskripsikan secara jelas sesuai dengan fakta dilapangan, serta penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kelurahan Buru Kecamatan Buru Kabupaten Karimun.

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada Subjek Peneliti, tetapi melalui Dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data. Wawancara Menurut (Suharto, 2010) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topic tertentu alat yang digunakan pedoman wawancara. Observasi Menurut (Mulyana, 2016) Menurutnya Observasi adalah suatu pengamatan mendapatkan informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian. Seperti turun kelapangan secara langsung ke lokasi penelitian serta dokumentasi.

Untuk mendukung penelitian ini, maka perlu adanya teori-teori yang mendukung atau memperkuat penelitian yang akan dilakukan dan sebagai landasan teoritik dalam pembahasan masalah yang akan diteliti. Teori-teori yang sesuai dengan penelitian ini adalah, Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

masalah yang akan diteliti. Teori-teori yang sesuai dengan penelitian ini adalah, Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk

bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Menurut Ripley dan Franklin dalam (Winarno 2008:145) mengatakan bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Menurut Cole dan Parston (2006:21) menjelaskan bahwa untuk dapat menentukan tinggi rendahnya Kinerja Implementasi suatu Kebijakan maka penilaian Kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu yang penting, penilaian terhadap Kinerja adalah penerapan metode yang dipakai oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan pokok dalam studi implementasi yaitu: apa isi dari tujuan dari suatu kebijakan, apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan apakah setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, implementasi yang dijalankan tadi mampu mewujudkan tujuan kebijakn atau tidak.

Dalam penelitian menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif bertujuan untuk mengetahui tentang Kinerja Implementasi Program BSPS di Kelurahan Buru. Kemudian hasilnya dideskripsikan secara jelas sesuai dengan fakta dilapangan, serta penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kelurahan Buru Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2018.

II. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui Kinerja Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadya Kelurahan Buru Kecamatan Buru Tahun 2018, Penelitian ini bertujuan untuk melihat Bagaimana Kinerja Implementasi Program Bantuan Stimulan Peruman Swadaya di Kelurahan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun tahun 2018.

Oleh karena itu, Pemberdayaan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seharusnya berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga berpotensi dalam meningkatkan taraf hidup bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di lingkungan Kelurahan Buru. Jumlah informan sebanyak 1 orang dari pihak Kelurahan sebagai Lurah di Kelurahan Buru, 5 orang masyarakat di lingkungan Kelurahan Buru yang terdiri dari 3 Masyarakat sebagai penerima Bantun dari Program BSPS dan 2 Orang sebagai masyarakat yang tidak menerima bantuan. Jumlah informan dari penelitian ini sudah cukup mewakili dengan mewawancarai orang-orang yang dianggap mengetahui informasi dan data yang dibutuhkan peneliti. Penelitian ini menggunakan variabel yang telah telah dikemukakan teori oleh Ripley dalam (Purwanto dan Sulstyastuti) yang di sebut dengan 7 Indikator untuk mengukur KinerjaImplementasi.

1. Akses

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan terkait dengan indikator Akses dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah karena dalam pelaksanaan kegiatan program dilapangan melalui rapat pertemuan dengan masyarakat dan informasi yang di terima juga sudah cukup jelas bagi masyarakat dalam memenuhi pengetahuan dan sarana informasi sangat penting dalam memenuhi Akses sebagai indicator tercapainya pelaksanaan program bantuan dengan baik.

2. Cakupan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan terkait dengan indikator Cakupan yang menjadi patokan dalam menentukan kriteria penerima bantuan BSPS diantaranya harus memiliki surat tanah dan rumah tidak layak huni BSPS melalui survei dilapangan seperti melihat kondisi dan kelengkapan isi rumah, belum maksimal dikarenakan masih ada masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkan bantuan ini dari hasil observasi peneliti dilapangan bahwasanya masih banyak masyarkat yang mendapatkan bantuan tidak sesuai

kreteria yang di tentukan oleh fasilitator lapangan, seharusnya Fasilitator lapangan harus lebih teliti lagi dalam mensurvei masyarakat di lapangan karena sasaran pada Program BSPS ini ini sangat membantu Masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Frekuensi

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan terkait dengan indikator Frekuensi dalam pelaksanaan Layanan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, masyarakat bahwa sudah cukup baik, tetapi dari hasil observasi peneliti saat turun kelapangan masih terlihat kurangnya Swadaya masyarakat dan systematika memanfaatkan fungsi dan peran dari dibentuknya kelompok tersebut seharusnya Fasilitator Lapangan harus memberi arahan kejelasan dalam pelaksanaan program BSPS dan masyarakat bisa saling memanfaatkan tenaga antar anggota kelompok atau kerja sama pada saat kegiatan memperbaiki rumah dengan sanak saudara ataupun tetangga.

4. Bias

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan terkait dengan indikator Bias dalam penyenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masyarakat bahwa belum maksimal . tetapi bagi penerima yang tidak mendapatkan BSPS dari hasil Observasi peneliti di lapangan di dukung dengan menanyakan kreteria masyarakat penerima bantuan maupun masyarakat yang tidak menerima bahwa program ini belum tepat sasaran dimana masih banyak yang tidak memenuhi kreteria mendapatkan bantuan, sedangkan masyarakat yang memenuhi kreteria tidak mendapatkan bantuan. masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan begitu sebaliknya. hanya saja masih ada masyarakat yang terdengar mengeluh kepada masyarakat penerima bantuan BSPS bahwasanya mereka juga membutuhkan bantuan BSPS ini.

5. Ketepatan Layanan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian peneliti di lapangan terkait dengan indikator Ketepatan layanan dalam pelaksanaan masyarakat sudah sangat puas dalam layanan atau jangka waktu 3 bulan yang diberikan sudah sesuai. laporan akhir tahun pun sudah bagus maka dari pada itu dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah baik dan cukup tepat bagi masyarakat penerima bantuan BSPS.

6. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian terkait indikator Akuntabilitas sudah sesuai hasil dari kegiatan BSPS berdasarkan progress masing- masing item pekerjaan rehap rumah yang dilaksanakan, kemudian pelaksanaan program BSPS ini juga bisa di pertanggung jawabkan karena laporan mingguan dan laporan akhir tahun tersebut di bantu dan di dampingi fasilitator, penambahan dan pengurangan penerima BSPS tidak terdengar oleh masyarakat, tanggung jawab petugas Fasilitator lapangan juga sudah di anggap baik dalam melayani kebutuhan masyarakat Penerima bantuan BSPS untuk pengurangan hak pun tidak ada dilakukan di lapangan.

7. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Indikator Kesesuaian program dengan kebutuhan, bahwasanya program ini sudah memenuhi kesesuaian program yang diberikan pemerintah untuk membantu MBR dengan kebutuhan membangun rumah yang layak bagi masyarakat dan sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membangun rumah yang kekurangan.

IV. KESIMPULAN

Dapat di simpulkan bahwa dari ke 7 indikator yaitu indikator, Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias, Ketepatan Layanan, Akuntabilitas dan Kesesuaian program dengan Kebutuhan, terdapat 3 indikator yang belum maksimal yaitu indikator Cakupan, Frekuensi dan Bias dimana dalam 3 indikator tersebut masih ada kekurangan seperti masyarakat masih banyak yang menerima bantuan tidak sesuai kreteria dan kurangnya fungsi dalam pelaksanaan pembentukan 20 anggota penerima

BSPS juga banyaknya keluhan masyarakat tidak mendapatkan bantuan BSPS.

1. Akses

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Implementasi dari program Bantuan Stimulan Swadaya ini dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah sesuai kebutuhan masyarakat dalam memenuhi pengetahuan dan sarana informasi sangat penting dalam memenuhi Akses sebagai indikator tercapainya pelaksanaan program bantuan dengan baik.

2. Cakupan

peneliti menyimpulkan bahwasanya dalam Indikator Cakupan yang menjadi patokan dalam menentukan kriteria penerima bantuan BSPS diantaranya harus memiliki surat tanah dan rumah tidak layak huni BSPS melalui survei lapangan melihat kondisi dan kelengkapan isi rumah belum maksimal dikarenakan masih ada masyarakat yang menerima bantuan tidak memiliki surat tanah dari hasil observasi peneliti di lapangan masyarakat penerima tidak sesuai kriteria yang di tentukan oleh fasilitator lapangan.

3. Frekuensi

Peneliti menyimpulkan bahwasanya dalam Indikator Frekuensi dalam pelaksanaan layanan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masyarakat bahwa sudah cukup baik, tetapi saat peneliti melakukan bservasi lapangan masih ada masyarakat yang tidak mengikuti systematika memanfaatkan fungsi dan peran dari dibentuknya kelompok hanya sekedar pembentukan.

4. Bias

Dengan ini peneliti menyimpulkan terkait dengan idikator Bias dalam penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masyarakat bahwa belum maksimal, tetapi bagi penerima yang tidak mendapatkan BSPS dari hasil Observasi peneliti di lapangan di dukung dengan menanyakatan kriteria masyarakat penerima bantuan maupun masyarakat yang tidak menerima bahwa program ini belum tepat sasaran dimana masih banyak yang tidak memenuhi kriteria mendapatkan bantuan.

5. Ketepatan Layanan

Dengan ini peneliti menyimpulkan terkait Idikator Ketepatan layanan dalam pelaksanaan masyarakat sudah sangat puas dalam layanan atau jangka waktu yang diberikan sudah sesuai laporan akhir tahun pun sudah bagus maka dari pada itu dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah baik dan cukup tepat bagi masyarakat penerima bantuan BSPS.

6. Akuntabilitas

Dengan ini peneliti menyimpulkan terkait Indikator Akuntabilitas sudah sesuai hasil dari kegiatan BSPS berdasarkan progress masing- masing item pekerjaan rehap rumah yang dilaksanakan selama waktu 3 bulan sudah plaksanaan program BSPS ini juga bisa di pertanggung jawabkan karena laporan mingguan dan laporan bulanan tersebut di bantu dan di damping fasilitator.

7. Kesesuaian program dengan Kebutuhan

Dengan ini peneliti menyimpulkan terkait Indikator Kesesuaian program dengan kebutuhan bahwasanya program dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak untuk masyarakat ini sudah memenuhi Kesesuaian program dengan kebutuhan bagi masyarakat dan sangat membantu masyarat yang kurang mampu untuk membangun rumah yang kekurangan dana.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Mulyana, D. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rodakarya
- Suhartato, E. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Sugiyono.2016.*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan RD*. Alfabeta.
- Iskandar. 2012. *Kapita Selekta Teori Adminstrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Winarno. 2008. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Med Press.

JURNAL

- Intiah, Arimurti Krisbowo, 2018. *Kinerja Implementasi Penuntasan Buta Aksara di Kecamatan Karang Jambu Kabupaten Purbalingga*. Vol 8 (No.2) 2018, hal 170.
- Nurul Jamila Hairani, 2017. *Evaluasi Kinerja Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak*. Universitas Airlangga. Vol 4 (No.1) 2017, hal 4-9.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

- Undang Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018.

